

Istana Pastikan Jokowi Belum Jadi Ketum Parpol Manapun

JAKARTA (IM) – Pihak istana memastikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi), belum menjabat sebagai ketua umum partai politik (parpol) manapun termasuk Partai Golkar.

Hal tersebut menanggapi anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam yang menyebut Presiden Jokowi sudah menjadi kader sejak dulu dan layak menjadi ketua umum partai berlogo pohon beringin itu.

"Terkait isu bahwa Presiden Jokowi akan masuk dan menjadi ketua umum parpol tertentu, sudah lama dides-desuskan dan terus digulirkan. Faktanya, sampai saat ini, Presiden Jokowi tidak menjadi ketua umum satu parpol-pun," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwiyanana dalam keterangannya, Selasa (19/3).

Menurut Ari, isu atau wacana serta dinamika yang berkembang di Partai Golkar menjadi urusan internal partai tersebut.

"Saat ini Presiden Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan

sampai berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober 2024," katanya.

Perlu diketahui, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa Presiden Jokowi sudah menjadi kader Partai Golkar sejak lama.

Ridwan menyebut Presiden Jokowi sudah menjadi kader Golkar sejak lama. Meski tidak ikut di kepemimpinan partai, namun Jokowi melaksanakan doktrin Golkar yakni Karya Siaga Gatra Praja.

Doktrin tersebut, katanya, mengajarkan setiap kader bekerja secara profesional serta membela pemerintah.

Dan menurutnya, Jokowi sudah menjadi kader Golkar selama menjalankan doktrin tersebut.

"Jadi doktrin kekaryaan itu sudah dilaksanakan dan Pak Jokowi ini pengurus Asosiasi Mebel Indonesia, di tahun 2002, dimulai tahun 97," kata Ridwan. ● han

KPK Periksa 4 Anggota DPRD Terkait Dugaan Korupsi Bandung Smart City

JAKARTA (IM) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa empat anggota DPRD terkait dugaan korupsi pengadaan CCTV dan penyediaan internet dalam proyek Bandung Smart City, Senin (18/3).

Mereka adalah Riantono, Yudi Cahyadi, Achmad Nugraha, dan Ferry Cahyadi. Dikabarkan, mereka merupakan tersangka baru dalam kasus tersebut bersama Ema Rusmana.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, dari keempat anggota DPRD Bandung itu digali informasi soal dugaan adanya titipan paket. Dugaan titipan paket pekerjaan tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam anggaran APBD perubahan Pemkot Bandung.

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan berupa titipan

paket pekerjaan untuk dimasukkan dalam anggaran APBD perubahan Pemkot Bandung," kata Ali melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (19/3).

Penyidik KPK sebelumnya telah memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna pada Kamis (14/3). Ia diperiksa dalam kasus yang sama.

Dari Ema, penyidik KPK menggali informasi soal posisinya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan posisi jabatan yang bersangkutan sebagai Ketua TAPD Kota Bandung yang salah satunya membahas anggaran berbagai proyek di Pemkot Bandung," kata Ali. ● han



RAKOR KEMENSOS DENGAN KOMISI VIII DPR Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3). Rapat kerja tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2023.

Menko Polhukam dan Menkominfo Bahas Isu Pasca-Pemungutan Suara

JAKARTA (IM) - Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian. Rakor tersebut membahas seputar isu Pemilu dan pasca-Pemilu 2024.

"Kami tadi membahas terkait isu-isu yang mengemuka khususnya adalah perbincangan di ruang publik tentang pemilu dan pasca-pemungutan suara," kata Hadi di Kemenko Polhukam usai rapat dengan Menkominfo dan Kepala BSSN di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Rapat juga dihadiri oleh Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar, beserta unsur perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI lainnya.

Hadi memastikan situasi Indonesia pasca-pemungutan suara berjalan kon-

duusif. Ia lantas mengajak seluruh kalangan masyarakat menjaga situasi tetap sejuk hingga tahapan Pemilu 2024 berakhir.

"Sebagai yang sudah saya sampaikan seminggu yang lalu bahwa saat ini kondisinya adalah situasi yang kondusif dan aman. Oleh sebab itu kita akan terus menjaga situasi ini, situasi kondusif dan aman ini sampai dengan berakhirnya tahapan pemilu 2024," ujarnya.

Hadi menerima laporan terkait langkah antisipasi menjaga situasi dan kondusifitas di media sosial. Ia mengajak seluruh pihak bekerja sama menangkal hoax serta mengisi media sosial dengan narasi yang menyejukkan.

"Di samping itu juga mengajak rekan rekan media untuk bersama-sama menangkal informasi palsu atau hoax demi menjaga kondusifitas yang saat ini terus kita jaga," kata Hadi menambahkan. ● mei

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



RAKOR KEMENKEU DENGAN KOMISI XI DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3). Rapat kerja tersebut membahas evaluasi fiskal pada triwulan I.

Hak Angket DPR soal Kecurangan Pemilu 2024 Ditujukan ke Pemerintah atau Penyelenggara Pemilu?

TKN Prabowo – Gibran mempertanyakan hak angket digulirkan untuk menelusuri dugaan kecurangan pilpres atau pileg?

JAKARTA (IM) - Wakil

Komandan Alpha Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fritz Edward Siregar mempertanyakan tujuan hak angket apabila benar-benar digulirkan. Ia pun mempertanyakan hak angket ditujukan ke penyelenggara pemilu atau pemerintah?

"Siapa yang mau dipanggil KPU-Bawaslu. Atau yang dipanggil pemerintah?" kata Fritz dalam Obrolan News-room Kompas.com, Senin

(18/3).

"Kita tahu penyelenggara pemilu itu adalah lembaga independen, namanya KPU dan Bawaslu, bukan pemerintah. Lalu kenapa dipanggil si pemerintah?" ujarnya.

Fritz juga mempertanyakan hak angket digulirkan untuk menelusuri dugaan kecurangan pemilihan presiden (pilpres) atau pemilihan anggota legislatif (Pileg).

"Yang mau kita hak angketnya apa? Pilegnya atau pilpresnya, atau pemilu? Kan

pemilu kan bukan hanya pilpres saja, ada pileg juga," kata Fritz.

"Tetapi kalau kita mendelegitimasi ada pertanyaan soal pilpres, secara enggak langsung mempertanyakan juga hasil dari pilegnya," ujarnya.

Terlepas apakah hak angket lolos atau tidak, menurut Fritz, dua persoalan itu harus dijawab. Menjelang pengumuman pasangan presiden-wakil presiden terpilih, mencuat wacana menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya, PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggunakan hak angket karena menurutnya DPR tidak boleh

diam dengan dugaan kecurangan yang menurutnya sudah telanjang.

Gayung bersambut, capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan partai politik pengusungnya juga siap untuk menggulirkan hak angket. Parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun, wacana tersebut seolah jalan di tempat karena belum ada satu pun anggota dewan bahkan fraksi partai politik yang resmi mengajukan atau menjadi inisiator untuk menggulirkan hak angket di DPR.

Sementara itu, Wakil Deputy Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Firman Jaya

Daeli, mengatakan, hak angket pada dasarnya akan digulirkan oleh partai politik pengusung capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Pada dasarnya arah kecenderungan memang ini akan kami gulirkan, ini prinsip. Ini bukan lagi hanya sekadar usulan Mas Ganjar Pranowo, tetapi sudah menjadi sikap partai politik," kata Firman dalam Obrolan Newsroom Kompas.com, Senin (18/3).

Namun, kata Firman, parpol pengusung masih ingin berkonsolidasi lebih utuh agar hak angket berkualitas. Misalnya, mana saja parpol yang lolos ke parlemen, dan sebaliknya.

"Karena kami menunggu konsolidasi yang lebih pasti," ujar Firman. ● han

Banjir di Kudus, 6 Orang Tewas Tenggelam dan Satu Korban Kesetrum Aliran Listrik

JAKARTA (IM) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus melaporkan, tujuh warga meninggal dunia saat bencana banjir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sejak Kamis 14 Maret 2024 lalu.

Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Kudus, Munaji, dirinya mengatakan, akibat bencana banjir tersebut ada tujuh orang warga Kabupaten Kudus meninggal dunia.

"Tenggelam enam dan kesetrum saat banjir satu orang," kata Munaji dalam keterangan tertulis yang diterima, dikutip Selasa (19/3).

Munaji menjelaskan, satu orang tenggelam dan terperosok di Persawahan Temulus, tiga orang tenggelam di Persawahan Kiri,

satu orang tenggelam di dekat tanggul Sungai. Kemudian satu orang tewas karena terseterum listrik saat berada di sekitar tiang listrik yang tergenang banjir.

"Satu orang tenggelam di Persawahan Dukuh Goleng pada hari ini pukul 16.00, sehingga 7 orang meninggal akibat banjir," lanjut Munaji.

Dilaporkan bahwa hingga Senin (18/3) sore, lima kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus, masih digenangi air. Kelima kecamatan itu antara lain Kecamatan Mejubo, Jati, Undaan, Jekulo dan Kaluwungu.

Banjir berdampak kepada 13.586 KK / 39.272 jiwa dan 1.287 KK / 4.188 jiwa di antaranya mengungsi ke tempat pengungsian dan

ke rumah kerabat yang lebih aman. Selain itu 6.523 unit rumah warga dan 2.295 hektar sawah turut terendam banjir.

BPBD Kabupaten Kudus beserta tim gabungan hingga hari ini masih melakukan evakuasi dan monitoring di lokasi terdampak, menyalurkan kebutuhan logistik bagi warga, pendampingan psikososial dan penanganan medis bagi warga yang membutuhkan.

Adapun tempat pengungsian tersebar di 25 titik, antara lain Balai Desa Gulang, Balai Desa Payaman, Balai Desa Jati Wetan, Balai Desa Kedungdowo, TPQ Khuriyatul Fikri Paslor, GKMI Tanjungkarang, Gedung DPRD, Gedung JHK Kudus, dan Pasar Saerah. ● mei

FOTO: HUMAS SETKAB/RAHMAH



MENGATASI DAMPAK EL NINO

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo memberikan keterangan pers, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/3). Untuk menekan dampak dari El Nino sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian, Kementerian Pertanian akan memasifkan pompanisasi pada lahan tadah hujan di sejumlah wilayah di tanah air.

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Telah Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

JAKARTA (IM) - Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur (KL), Umar Faruk, mengakui telah melakukan perubahan pada data pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.402 pemilih. Hal itu dilakukannya tanpa adanya rapat pleno.

Umar Faruk mengakui hal ini saat diperiksa sebagai terdakwa kasus dugaan pemalsuan data daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Kuala Lumpur, pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Ketua PPLN Kuala Lumpur mengakui hal itu saat dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung terkait pengurangan nama DPT hasil koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

"Apakah sekitar bulan Desember sampai tanggal 4 Januari 2024 ada dilakukan pengurangan atau pengeluaran nama-nama dari daftar pemilih kemudian memasukkan data-data baru yang diperoleh dari data domestik atase Ketenagakerjaan?" tanya jaksa.

"Iya," jawab Umar.

"Berapa banyak nama pemilih itu?" tanya jaksa lagi.

"1.402," kata Umar singkat.

Atas jawaban itu, Jaksa pun menyelidik mekanisme untuk mengubah data pada DPT tersebut.

Dari sini, terungkap bahwa perubahan data tersebut dilakukan tidak melalui rapat pleno.

"Apakah terhadap perubahan, pengurangan dan penambahan DPT itu dilakukan melalui pleno terbatas atau terbuka?" tanya jaksa.

"Tidak ada," jawab Umar.

Umar menjelaskan, ide untuk mengubah data pada DPT itu berasal Tita Octavia Cahya Rahayu yang juga terdakwa dalam perkara ini. Saat itu, Tita menjabat sebagai anggota Divisi Keuangan PPLN KL.

"Siapa yang berinisiatif untuk mengubah data pemilih tersebut?" cecar jaksa.

"Saudara Tita," jawab Umar lagi.

Dalam perkara ini, tujuh PPLN Kuala Lumpur didakwa telah melakukan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data DPT. Ketujuhnya terdakwa itu adalah Ketua PPLN Kuala Lumpur Umar Faruk dan enam anggota PPLN Lainnya, yaitu Tita Octavia Cahya Rahayu seorang mahasiswa serta Dicky Saputra.

Kemudian, dua orang dosen bernama Aprion dan Puji Sumarsono serta A Klalil seorang wiraswasta yang bertugas sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, ada juga seorang dosen yang juga bernama Masduki Khamdan Muchamad. Masduki sempat menjadi buron.

"Telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, baik yang menyuruh, yang melakukan atau yang turut serta melakukan," kata Jaksa dalam sidang di PN Jakarta Pusat, Rabu (13/3) lalu.

Atas perbuatannya, tujuh PPLN dinilai telah melanggar Pasal 544 dan 545 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ● han